

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. 2 Juli 2019. www.bps.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Tahunan DJP*. 2 Juli 2019. www.pajak.go.id
- Djuitaningsih, Tita., & Oktafani, Maulida. (n.d). *Hubungan Penerapan PSAP No. 2 Tentang Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan*.
- Gumilang, Galang Surya. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*. *Jurnal Fokus Konseling*, 2, 144-159.
- Gustomo, Ma'ruf. (2018, Maret 20). *Menciptakan Pajak Yang Ramah Untuk UMKM*. 27 Februari 2019. <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm>.
- Indrianti, I., Suhendro., & Endang, Masitoh. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Surakarta)*. *Seminar Nasional IENACO*, 712-717.
- Irawan, T. E., & Purnamasari, T. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pasien Penderita HIV/AIDS Di Poli Klinik Akasia RSUD Majalengka Tahun 2016*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 2, 20-33.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar*. (n.d.). 26 Februari 2019. <http://www.depkop.go.id>.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta
- Nainggolan, H., & Siti, Patimah. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan*. *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi*, 10, 188-195.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2010). No 184/PMK.03/2010 *Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2014). PMK No. 242/PMK.03/2014 *Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.

- Peraturan Pemerintah. 2018. No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final Pelaku UMKM.
- Putri, T., David, P. E., & Novi, S. Budiarmo. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14(1), 130-136.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A Tentang Hal Keuangan.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang UU KUP.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinambela, Tongam. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Supit, W.M., Saerang, D.P.E., & Sabijono, H. (2014). Analisis Restitusi Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 2, 159-166.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Syah, A.L.N., Widiyanto, A., & Purwitasari, E. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 3, 46-55.
- Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 8.
- Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber dari web:

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (2012). Kenali Aturan Dalam Pelaporan Pajak. 10 Maret 2019. <http://www.pajak.go.id/content/kenali-aturan-dalam-pelaporan-pajak>.

Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *e-billing*. 14 Maret 2019. <http://www.pajak.go.id/content/e-billing>.

Direktorat Jenderal Pajak. (2018, Agustus 1). Kebijakan PPh Final Setengah Persen bagi UMKM, Dua Sisi Mata Uang. 27 Februari 2019. <http://www.pajak.go.id/article/kebijakan-pph-final-setengah-persen-bagi-umkm-dua-sisi-mata-uang?lang=en>.

Hestu Yoga Saksama. (2018, Juni 24). Tarif Pajak UMKM Turun, Apa Kabar Potensi Penerimaan Negara?. 10 April 2019. <http://www.jawapos.com/ekonomi/24/06/2018/tarif-pajak-umkm-turun-apa-kabar-potensi-penerimaan-negara/>.

Sri Mulyani. (2019, Februari 19). Sri Mulyani: Tax Ratio 11.5%, Dibawah Standar Regional. 10 April 2019. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4435447/sri-mulyani-tax-ratio-115-di-bawah-standar-regional>.

Yustinus Prastowo. (2019, Januari 9). Banyak UKM Gulung Tikar Karena Masalah Pajak. 9 April 2019. <http://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/09/064710526/banyak-ukm-gulung-tikar-karena-masalah-pajak>.